

MENGENANG KEMBALI PEMILIHAN UMUM MUANGTHAI TAHUN 1975 DENGAN PENGARUH HUBUNGAN SIPIL- MILITER DALAM PEMERINTAHANNYA*

Freddy Kusnady K.**

ABSTRACT

As we know there is usually no major party in the government of Thailand. The cabinet formed after the general election consists of a number of parties which have joined and formed a coalition party. A coalition cabinet formed like this by the prime minister never exists long. A vote of no confidence from the parliament will bring down the coalition cabinet. This article is written as a remembrance of the late Mr. Kukrit Pramoj, ex prime minister of Thailand. In the general election of January 26, 1975, Mr. Kukrit Pramoj as a low profile figure has played an important role. He has become the prime minister, although at first he had withdrawn himself from the election of the prime minister.

I. PENDAHULUAN

Muangthai sebagai suatu negara yang terletak di Asia Tenggara sejak dahulu merupakan suatu kerajaan yang penduduknya sekurang-kurangnya 80% adalah petani yang matapencahariannya kebanyakan dari menanam padi. Beras merupakan satu-satunya hasil produksi terbesar dalam perekonomian negara ini yang menghasilkan surplus dan mendatangkan sejumlah besar devisa bagi negara.

Stabilitas dan keamanan kehidupan di pedesaan Muangthai merupakan syarat yang penting dalam memantapkan keadaan sosial dan ekonomi negara lain, dan menetapkan ciri-ciri khusus tertentu bagi pemerintahan dan politiknya. Para petani yang ekonominya pada umumnya baik dan stabil serta terjamin hak miliknya, kebanyakan tidak menghiraukan keadaan politik nasionalnya.

Keadaan yang sangat menguntungkan ini disebabkan karena keadaan alamnya; tanahnya subur sekali, iklim dan letak geografisnya sedemikian rupa, sehingga ikan memenuhi sungai-sungainya dan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran tumbuh tanpa perlu ditanam secara khusus. Politik pemerintah yang kepentingannya terletak pada kestabilan telah mendatangkan keamanan bagi penduduk pedesaan ini. Negara ini sangat konservatif.

Kehidupan di kota besar didasarkan atas perdagangan uang yang sebagian besar adalah perdagangan luar negeri. Pemerintah sendiri dan para pengusaha untuk bagian terbesar

* Tulisan ini merupakan in memoriam bagi Krukrit Pramoj, 20 April 1911 – 9 Oktober 1995.

** Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

terikat dan tergantung pada ekspor produksi alam negara ini seperti beras, kayu, karet dan beberapa komoditi kecil lainnya. Minyak, pakaian dan hasil-hasil pabrik lainnya diimpor. Politik adalah urusan ibukota Muangthai, yaitu Bangkok dan dalam kota ini politik pun merupakan kepentingan suatu golongan yang sesungguhnya sangat kecil, yang terdiri dari orang-orang yang kebanyakan bekerja di pemerintah. Di atas mereka ini dan yang sangat berpengaruh, adalah para pegawai tinggi, beberapa politikus terkemuka, beberapa pengusaha kaya dan perwira-perwira lapangan di angkatan bersenjata. Di puncaknya dan yang memanipulasi lapisan-lapisan bawah ini adalah para perwira militer dan beberapa pemimpin sipil terkemuka; yang disebut "*ruling group*" di Muangthai.

Lembaga-lembaga organisasi dari golongan ini sebagian besar bersifat birokratis dalam arti luas. Menurut urutan kepentingannya, mereka terdiri dari: (1) angkatan darat, (2) polisi, (3) angkatan udara, (4) angkatan laut, (5) parlemen, (6) raja, (7) pegawai tinggi, dan (8) pengusaha. Opini publik dinyatakan oleh pers dan juga universitas merupakan suatu kekuatan politik yang besar.

Empat slogan yang terdapat dalam kamus politik Muangthai, yaitu:

1. *Raja*, yang merupakan simbol dari konservatisme politik.
2. *Agama Budha*, yang merupakan simbol konservatisme kebudayaan dan kesatuan.
3. Bangsa, yaitu nasionalisme yang lebih hidup dalam "*the ruling class*". Secara kultural nasionalisme di Muangthai tidak tradisional tetapi asimilatif; secara politis tidak revolusioner tetapi konservatif, selalu menginginkan perdamaian dan ketenangan untuk kepentingan bangsa.
4. *Demokrasi*, yang melambangkan suatu gabungan antara perasaan kewajiban ("*ne blesse et oblige*") di satu pihak dan tujuan dari *priveleges* hukum yang paling utama di pihak lain.

Walaupun telah ada dasar kesatuan pikiran secara luas, *the ruling class* dalam penekanan ideologisnya terbagi atas tiga golongan:

1. Golongan I: yang kebanyakan terdiri dari orang yang telah tua yang lebih tradisional dari golongan lainnya, menekankan respeknya kepada raja dan agama, dan karena ada pada posisi "*politically disadvantage*", menekankan pula pada kebebasan hukum, politik dan ekonomi.
2. Golongan II: kebanyakan terdiri dari golongan militer, yang sangat kuat berpegang pada nasionalisme. Mereka mengklaim pentingnya pertahanan yang akibatnya menambah budget militer dan *privileges* untuk prajurit. Golongan ini juga sangat setuju untuk mengangkat anggota parlemen dari golongan mereka guna "menjaga kestabilan nasional".
3. Golongan III: sebagian besar terdiri atas politikus sipil dan anggota parlemen yang terpilih, bertujuan untuk menekankan perlunya pemilihan bebas, pengawasan

parlementer yang kuat dan keuntungan yang lebih banyak untuk para pemilih (rakyat). Keanggotaan golongan ini dielri-khususkan pada diri mereka sendiri sebagai orang Sosialis.

II. HUBUNGAN SIPIL MILITER

"Kegagalan pemimpin sipil untuk bertindak secara tepat dan tegas telah melicinkan jalan kepada pemimpin militer untuk memasuki lembaga-lembaga sipil". Demikianlah anggapan orang setiap kali terjadi pengambil-alihan kekuasaan negara dari penguasa sipil ke penguasa militer. Untuk tujuan menganalisis peranan militer dalam perkembangan politik di negara-negara baru, Morris Janowitz dalam tahun 1963 telah mengidentifikasi lima tipe hubungan sipil-militer:

1. Kontrol pribadi yang otoriter (*authoritarian-personal control*). Ini adalah suatu rejim otoriter, yang dapat berdasarkan kekuasaan pribadi atau tradisional seperti di Ethiopia, atau atas otokrasi yang berkembang seperti di Vietnam Selatan. Ini adalah tipe "*authoritarian personal control*" dan ditemui dalam bangsa yang baru memulai proses modernisasi.
2. Kontrol partai-massa yang otoriter (*authoritarian-mass party control*). Merupakan suatu kekuasaan otoriter yang dapat berakar pada negara satu partai, di bawah kepemimpinan pribadi yang kuat, tanpa lembaga parlementer. Tipe hubungan sipil-militer seperti ini dinamakan: "*authoritarian mass-party control*". Di negara dengan tipe ini, polisi sipil dan lembaga para militer kedua-duanya beroperasi sebagai lawan dari militer, yang dengan sendirinya merupakan golongan kecil dan belum berkembang penuh seperti Ghana, Mali dan Guinea.
3. Sistem demokrasi kompetitif atau setengah-kompetitif (*democratic competitive and semi-competitive systems*). Pada tipe ketiga ini, peranan militer itu adalah "*a mark of sovereignty*" dan dibatasi pada fungsinya saja, karena kekuatan kompetitif dari lembaga demokratis seperti di India dan Malaysia dan pola hubungan sipil-militernya didasarkan atas kontrol sipil yang dapat disebut "*democratic-competitive*". Dalam sistem demokrasi kompetitif (termasuk sistem semi-kompetitif seperti di Tunisia dan Maroko), supremasi sipil terletak pada pembatasan peranan militer untuk sebagian, karena tradisi kolonial telah menanamkan suatu perasaan "*self-restraint*" yang kuat terhadap militer. Di negara-negara dengan tipe ini terdapat kompetisi antara lembaga sipil dan golongan yang berkuasa, demikian pula antara partai politik massa yang mendominasi politik domestik, tetapi masih memungkinkan untuk menetapkan suatu ukuran tertentu bagi kompetisi politik tersebut.

4. Koalisi sipil-militer (*civil military coalition*). Bila golongan militer meluaskan aktivitas politiknya dan menjadi suatu blok politik, pemimpin sipil jika tetap mempunyai kekuasaan hanyalah disebabkan karena restu secara pasif atau bantuan aktif dari pihak militer. Di sini luas kompetisi politik berkurang dan ini melukiskan pola dari "*civil-military coalition*", karena peranan menentukan berasal dari angkatan bersenjata. Di sini pula militer bertugas sebagai suatu blok politik aktif dalam bantuannya pada partai sipil dan golongan kekuasaan birokratif lainnya. Golongan sipil mempunyai "*power*" karena bantuan militer. Indonesia, menurut Janowitz, pada tahun 1963 merupakan contoh dari intervensi politik seperti itu.
5. Oligarki militer (*military oligarchy*). Pada tipe koalisi sipil-militer, militer dapat bersikap sebagai wasit yang informal atau yang sebenar-benarnya antara partai politik dan golongan politik, yang saling bersaing, sebagaimana halnya di Turki. Pada tingkat ini militer boleh didesak untuk mendirikan suatu "*caretaker government*", dengan suatu kemungkinan nanti akan mengembalikan kekuasaan kepada golongan politik sipil. Itulah maksud dan praktek pemerintah militer Myanmar yang pertama dan maksud pemimpin militer di Pakistan. Aliansi dan pemerintahan "*caretaker*" semacam ini tidak stabil dan acapkali membawa kepada keruwetan-keruwetan atau ke tingkat yang lebih luas, di mana pihak militer menempatkan dirinya sendiri sebagai "*ruling class*" politis seperti halnya di Muangthai sebelum revolusi Oktober 1973, Mesir dan Sudan. Hasilnya ini adalah suatu "*military oligarchy*", karena sekurang-kurangnya untuk suatu jangka waktu terbatas prakarsa politik diserahkan kepada pihak militer. Bilamana suatu pengambil-alihan kekuasaan terjadi dan golongan militer menjadi "*ruling group*", aktivitas politik sipil akan diubah bentuknya (*transformed*), dibatasi (*restricted*) dan ditindas (*repressed*).

III. PERKEMBANGAN POLITIK

Menurut pendapat David A. Wilson, seorang pakar tentang Muangthai, ada kecenderungan yang luas di antara warga negara Muangthai yang sadar politik, bahwa kerajaan mereka seharusnya mempunyai suatu konstitusi. Selama sebelum pemilu tahun 1975, Muangthai telah mempunyai enam bentuk konstitusi tertulis, dua yang bersifat sementara dan empat merupakan versi yang permanen. Ada persamaan yang luas dalam berbagai versi konstitusi itu.

Raja sebagai Kepala Negara melaksanakan kekuasaan berdaulat dari rakyat melalui tiga cabang pemerintahan, yaitu:

1. *Eksekutif*, dalam suatu kabinet dari Menteri-Menteri Raja.
2. *Legislatif*, melalui suatu parlemen yang sekurang-kurangnya sebagian dari anggotanya adalah wakil rakyat.
3. *Yudikatif*, melalui suatu sistem peradilan yang dibentuk secara sah.

Hak asasi dilindungi dari tindakan eksekutif yang sewenang-wenang. Kehijaksanaan umum tertentu mengenai kesejahteraan sosial ditetapkan dalam suatu baluan negara.

Mengenai bentuk parlemen dalam konstitusi itu berbeda. Ini tidak mengherankan karena tujuan yang terutama dari revolusi konstitusional di Muangthai adalah untuk mengalihkan kekuasaan perundang-undangan dari Raja dan menyerahkannya kepada parlemen.

Dalam sejarahnya Muangthai telah mengalami unikameral dan bikameral parlemen. Walaupun posisi konstitusionalnya kuat, parlemen tidak pernah berhasil mengemahkan kekuasaannya yang potensiil itu. Ada beberapa kelemahan parlemen yang terus-menerus itu, yaitu:

1. Parlemen adalah suatu lembaga baru di Muangthai dan tidak ada persetujuan mengenai peranannya yang sebenarnya dalam proses politik. Parlemen telah mengalami penghinaan selama masa itu, termasuk dibekukan, dibubarkan dan dircorganisasi dalam masa jabatannya. Pada saat yang sama itu ketentuan konstitusi sebagaimana telah disinggung di atas secara implisit menunjukkan suatu ketidakpercayaan dari sebagian pemimpin nasional mengenai kebaikan dan kebijaksanaan dari anggota yang terpilih. Secara singkat parlemen tidak mempunyai "*tradition of dignity*".
2. Fraksi di parlemen mempunyai sedikit sekali kekuatan di luar parlemen. Organisasi partai sangat lemah dan kekurangan basis dukungan dari rakyat. Anggota parlemen mungkin kuat secara pribadi dalam daerah pemilihannya, tetapi tidak ada organisasi nasional yang dapat memaksakan disiplin dalam parlemen. Faktor ini menyebabkan dominasi yang terus menerus oleh pemerintah terhadap parlemen. Mengingat *prestige* luar biasa dari pemerintahan raja dan dari birokrasi pada umumnya serta "*backing*" militer pada khususnya, mengakibatkan kabinet sanggup "mengatur" parlemen dengan tegas. Dengan mempergunakan ancaman, bujukan, sogokan dan perlindungan (*patronage*) sebagai tambahan dari kekuasaan untuk menunjuk anggota parlemen sendiri, menyebabkan pemerintah (dengan kekecualian yang jarang sekali) memaksakan disiplin besi kepada mayoritasnya.

Partai politik Muangthai tidak lebih dari "*group parlementair*". Sifat organisasi partai untuk sebagian besar dipengaruhi oleh kenyataan dominasi eksekutif yang luar biasa di parlemen. Golongan yang menyokong pemerintah dibina dari anggota teras yang ditunjuk pemerintah, ditambah dengan anggota terpilih yang karena berbagai sebab menyokong pemerintah dengan alasan yang bermacam-macam dan golongan ini *heterogen*. Sekurang-kurangnya ada 3 kategori motif ini yang telah dipergunakan oleh pemerintah yang berkuasa

untuk membina sokongan parlemen yang tegas. Oleh karena pemerintah mempunyai segala fasilitas untuk menarik para oportunis, oposisi cenderung untuk membentuk golongan kecil dan yang lebih *homogen*.

Kekuasaan eksekutif dari pemerintahan terdiri atas Perdana Menteri, Kabinet dan birokrasi sipil dan militer. Meskipun kekuasaan untuk membuat kebijaksanaan dipecah dan dibagi secara luas dalam struktur administrasi, kekuasaan terakhir mengenai pengangkatan, penyidikan dan pertimbangan terletak di tangan Perdana Menteri. Perdana Menteri tidak hanya mempunyai kekuasaan untuk membentuk kabinetnya, di mana ia mempunyai supervisi politik terhadap menteri-menterinya, tetapi dia melaksanakan pula "*the royal power*" untuk menunjuk dan memecat pegawai negeri yang menjadi "*permanent undersecretaries*" dan kepala departemen. Oleh karena itu ia dapat mengomandokan loyalitas pribadi birokrat yang memegang posisi kunci (*key-position*).

Sebagaimana halnya dengan Indonesia, Muangthai mempunyai kesatuan sistem peradilan umum yang terdiri dari tiga macam peradilan umum, yaitu pengadilan negeri, pengadilan appel dan malikamah agung (*Dika*). Keadilan diatur sesuai dengan kodifikasi hukum dan acara yang membatasi secara tepat status orang, hak milik, dsb. Hakim dilindungi dari campur tangan yang sejauh mungkin dengan menentukan bahwa seluruh pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian hakim dilakukan oleh raja sesuai dengan hukum dan dengan persetujuan "*Judicial Commission*" yang terdiri dari anggota *ex officio* tertentu dan mayoritasnya oleh "*the kingdom's judges*".

Suatu hal yang pokok untuk mengerti politik di Muangthai adalah mengetahui posisi organisasi administrasinya, karena "*the ruling class*" pada umumnya adalah birokrasi, sedangkan kelas perdagangan dikuasai oleh golongan asing dan diintimidasi secara politis dan kelas sosial yang besar dan fundamental adalah para petani yang "*religious*", yang bebas dari tekanan kemasyarakatan yang revolusioner, "*frame*" politiknya adalah sempit. Pada umumnya administrasi intern sangat di-sentralisasi secara langsung. Dua unit dasar administrasi adalah propinsi dan distrik. Ada 71 propinsi dan 411 distrik di Muangthai. Pegawai senior di propinsi adalah gubernur dan pegawai senior di distrik adalah kepala distrik.

Pemimpin politik bertaraf nasional di Muangthai bukanlah merupakan pilihan rakyat. Organisator dan pemimpin dari 3 *coups* besar di tahun 1932, 1947 dan 1957 telah bertindak selaku pemimpin politik nasional. Partisipasi dalam ketiga *coups* tersebut telah membuka jalan kepada kedudukan kekuasaan bagi seluruh pemimpin lainnya, seperti *Field Marshall Phibungsongkhram*, *Field Marshall Sarit Thanarat* dan *General Thanom Kittikachorn*. Hal ini disebabkan karena setiap *coup* itu adalah suatu operasi militer, di mana perwira militer yang menguasainya. Suatu aspek pokok kepemimpinan politik yang berhasil adalah kesanggupan untuk mengomando loyalitas militer, terutama unit angkatan darat di ibukota.

Dalam kerangka dasar (*basic framework*) dari suatu quasi-formal organisasi dan institusi pemerintahan, klik yang bersifat pribadi adalah unit dasarnya. Klik di sini bukanlah semacam institusi yang *uniform*, tetapi hanya suatu sistem loyalitas dari kestabilan yang tak menentu.

Klik itu terdiri atas berbagai bentuk dan dibina atas berbagai hubungan pribadi yang langsung. Organisasi politik berpiramida dari klik ini. Tak dapat diragukan lagi bahwa klik itu terutama didasarkan atas ikatan kekeluargaan antara ayah-anak, suami-isteri, abang-kakak, dst; tetapi berabad-abad lamanya hubungan sosial yang quasi-feodal di Muangthai ini telah berkompetisi dengan ikatan kekeluargaan. Pada waktu itu loyalitas seperti guru-murid, teman sekolah, loyalitas unit dalam kemiliteran dan berbagai bentuk loyalitas yang bersifat persahabatan adalah penting di masyarakat Muangthai. Klik dapat pula diteruskan dari sekedar ikatan pribadi yang murni melalui kesanggupan untuk memberikan kontra-prestasi berupa kekuasaan, *privilege* dan kekayaan. Oleh karena itu kekuasaan di atas tersebut tergantung dari kesanggupan untuk mengilhami dan memanipulasi pengikut yang loyal dan yang bersedia untuk mempromosikan, melindungi dan mempertahankan posisi pemimpin.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa kegagalan pemimpin sipil untuk bertindak secara tepat dan tegas telah melicinkan jalan kepada pemimpin militer untuk memasuki lembaga sipil; hal yang demikian ini juga terjadi di Muangthai. Pemerintahan yang dikuasai oleh sipil usianya tidak lama, umumnya tidak mencapai satu tahun, sehingga kegagalan ini menyebabkan masuknya golongan militer ke dalam pemerintahan dan menguasai lembaga sipil tertinggi, jadi pemerintah dikuasai oleh suatu oligarki militer. Terakhir sekali sebelum revolusi Oktober 1973, pemerintah Muangthai dikuasai oleh suatu rejim militer di bawah pimpinan *General Thanom Kittikachorn* sebagai perdana menteri. Akibat suatu pemerintahan rejim militer menyebabkan timbulnya pergolakan di kalangan sipil terutama di kalangan mahasiswa, demonstrasi mahasiswa dan pemogokan massal terjadi. Mereka menentang pemerintahan totaliter dari rejim militer tersebut, sehingga pada bulan Oktober 1973 yang terkenal dengan revolusi Oktober 1973 akhirnya rejim Thanom Kittikachorn dapat digulingkan. Demikian pula sebaliknya, pada waktu pemerintah dikuasai oleh golongan sipil, kegagalan pemerintah sipil sangat mengecewakan rakyat Muangthai. Menurut mereka kegagalan tersebut disebabkan karena pemimpin sipil selama itu bukanlah pilihan rakyat, pemimpin sipil umumnya ditunjuk oleh pemerintah (c.q. Perdana Menteri), demikian pula pemimpin politik yang bertaraf nasional. Peristiwa bersejarah ini akan sangat besar pengaruhnya atas pemilihan umum tanggal 26 Januari 1975, di mana rakyat menginginkan suatu pemerintahan yang lebih demokratis, pemimpin dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

IV. SISTEM PEMILIHAN UMUM

Dilihat dari sudut pandangan terhadap rakyat, apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya dan sekaligus mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyat, ataukah rakyat dipandang sebagai anggota yang tidak berhak untuk menentukan siapa wakilnya, maka akan dihasilkan dua sistem pemilihan umum yang berbeda, yaitu:

1. *Sistem pemilihan mekanis*, yaitu pandangan dimana rakyat dipandang sebagai suatu masa individu yang sama. Aliran Liberalisme, Sosialisme dan Komunisme semua berdasarkan pandangan "mekanis" ini. Bedanya hanyalah liberalisme mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan antar individual yang bersifat kontraktual, sedangkan sosialisme dan khususnya komunisme mengutamakan totalitet kolektif masyarakat dan mengecilkan peranan individu dalam totalitet kolektif itu. Walaupun demikian semua aliran di atas itu mengutamakan individu sebagai pengendali hak pilih aktif dan memandang rakyat (korps pemilih) sebagai suatu masa individu yang masing-masing mengeluarkan satu suara (suara dirinya sendiri) dalam tiap-tiap pemilihan.
2. *Sistem pemilihan organis*, yaitu pandangan dimana rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warga persekutuan hidup: genealogis (rumah tangga, keluarga), fungsional tertentu (ekonomis industri), lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan) dan lembaga sosial (universitas). Masyarakat dipandang sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitet organisme itu, yaitu persekutuan hidup tersebut di atas. Berdasarkan pandangan ini persekutuan hidup itulah yang diutamakannya sebagai pengendali hak pilih, atau dengan perkataan lain, sebagai pengendali hak untuk mengutus wakil kepada perwakilan masyarakat.

Menurut sistem pemilihan mekanis, partai politik yang mengorganisasi pemilih dan memimpin pemilihan berdasarkan sistem *Bi Party* atau *Multi Party* (Liberalisme Sosialisme) atau sistem *Uni Party* (Komunisme), sedangkan menurut sistem pemilihan organis, partai politik tidak perlu dikembangkan karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri.

Menurut sistem yang pertama Badan Perwakilan bersifat Badan Perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya, menurut sistem yang kedua Badan Perwakilan bersifat Badan Perwakilan kepentingan khusus persekutuan hidup itu. Dalam bentuk paling ekstrim yang satu menghasilkan "Parlemen", yang lain menghasilkan "Dewan Korporatif". Perlu diperhatikan bahwa kedua sistem itu dapat juga dikombinasikan khusus dalam negara dengan sistem bi-kameral.

Dalam sistem mekanis, wakil yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat langsung dipilih, dan dalam sistem organis wakil tersebut berdasarkan pengangkatan, maka dalam negara yang mengamati dua Badan Perwakilan kedua sistem tersebut dapat digabungkan. Kesulitan yang mungkin timbul dari sistem organis ini ialah ukuran apa yang dipakai untuk menentukan jumlah anggota DPR yang diangkat.

Dalam pelaksanaannya sistem pemilihan mekanis dapat dilakukan dengan dua cara:

1. **Sistem perwakilan distrik/mayoritas/single member constituencies;**
dinamakan sistem distrik, karena wilayah negara dibagi dalam distrik pemilihan (daerah pemilihan), yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Umpamanya jumlah anggota DPR ditentukan 500 orang, maka wilayah negara dibagi dalam 500 distrik pemilihan (daerah pemilihan) atau *constituency*. Jadi setiap distrik pemilihan diwakili oleh satu orang wakil di DPR. Karena itulah dinamakan sistem distrik. Dinamakan sistem mayoritas, karena untuk menentukan siapakah yang akan terpilih sebagai wakil rakyat dari suatu distrik, ditentukan oleh siapa yang memperoleh suara yang terbanyak (mayoritas). Dan tidak perlu merupakan mayoritas mutlak. Umpamanya di distrik I, calon A memperoleh suara 10.000, B memperoleh 7.500, C memperoleh 9.000, maka yang terpilih sebagai wakil dari distrik I di Badan Perwakilan Rakyat ialah A. Jadi dalam distrik, tiap distrik diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara mayoritas. Pemilihan umum dilakukan sekali jalan, suara yang tidak terpilih dari satu distrik pemilihan, tidak dapat digabungkan dengan suara yang diperoleh dari distrik pemilihan yang lain. Ini berarti bahwa setiap suara yang tidak mencapai mayoritas, yang berarti bahwa tidak terpilih, tidak dihitung atau menjadi hilang.
2. **Sistem perwakilan proposional,** ialah sistem di mana persentase kursi di Badan Perwakilan Rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu. Umpamanya jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilihan umum adalah 10.000.000 orang, dan jumlah kursi di Badan Perwakilan Rakyat ditentukan sebanyak 100 kursi, berarti untuk satu orang wakil dibutuhkan suara 100.000. Pembagian kursi di Badan Perwakilan Rakyat tersebut tergantung kepada berapa jumlah suara yang didapat setiap partai politik yang ikut pemilihan umum itu. Bila dipergunakan sistem ini, maka dalam bentuk aslinya tidak perlu lagi membagikan korps pemilih atas jumlah distrik pemilihan. Tentu saja korps pemilih boleh dibagikan atas sejumlah daerah pemilihan, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan itu disediakan beberapa kursi sesuai dengan jumlah penduduknya. Dalam tiap-tiap distrik pemilihan kursi itu dibagikan diantara partai politik, yang seimbang dengan banyaknya suara yang diperolehnya

dari jumlah suara dikeluarkan oleh korps pemilih di distrik itu. Umpamanya suatu distrik pemilihan, karena penduduknya cukup padat, maka ditetapkan jumlah wakilnya 10 orang, dimana tiap kursi harus memperoleh 20.000 suara. Setelah pemilihan umum dilaksanakan, ternyata suara yang sah hanya 180.000 saja, maka perhitungan untuk tiap kursi menjadi 18.000. Sekarang tergantung kepada jumlah suara yang diperoleh oleh setiap partai politik yang ikut pemilihan umum, dengan dibagi 18.000. Sistem ini dapat dilaksanakan dalam 300 variasi, tetapi ada dua metode yang utama:

- a. *Single transferable vote (Hare system)*, di mana pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua dan seterusnya dari distrik pemilihan yang bersangkutan. Jumlah imbalan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan, dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya, dan seterusnya. Contoh, jumlah suara yang diperlukan untuk dapat terpilih sebagai wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat di suatu distrik pemilihan 10.000 suara. Calon A mendapat 19.000, B mendapat 9.000, C mendapat 7.000 dan D mendapat 5.000. Kalau didasarkan atas perhitungan suara secara distrik, maka yang terpilih sebagai wakil rakyat dari distrik pemilihan tersebut adalah A, dan suara untuk calon lainnya tidak dihitung. Kalau didasarkan kepada imbalan suara 10.000, maka yang terpilih adalah A juga, tetapi karena dipraktekkan sistem Hare, maka kelebihan suara dari A sebanyak 9.000 dapat dipindahkan kepada calon B, sehingga calon B juga terpilih, dan kelebihan suara dari calon B sebanyak 8.000 dapat pula dipindahkan kepada calon C, sehingga calon ini juga terpilih, kelebihan suara sebanyak 5.000 dapat pula dipindahkan kepada calon D, yang akhirnya juga terpilih. Jadi yang seharusnya terpilih hanya A, karena memenuhi jumlah yang ditentukan, akibat dipakai sistem Hare, maka keempat calon pada akhirnya terpilih semua. Adanya penggabungan suara ini, maka kemungkinan bagi partai politik yang kecil mendapat kursi di Badan Perwakilan Rakyat selalu ada. Sebaliknya sistem ini menghendaki suatu perhitungan yang cermat, karena berbelit-belit.

- b. *List system*, di mana pemilih diminta memilih diantara daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum.

Apabila terlalu banyak partai politik di Badan Perwakilan Rakyat, maka akibatnya tidak ada partai politik yang menguasai secara mayoritas suara di Badan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu setiap kali terjadinya pembentukan kabinet, selalu dengan cara koalisi antara beberapa partai, agar kabinet tersebut mendapat kepercayaan dari Badan Perwakilan Rakyat. Setiap koalisi didasarkan kepada kompromi yang setiap saat dapat

pecah, karena dasarnya tidak kuat. Apabila salah satu partai saja menarik diri dari kabinet, maka biasanya kabinet mengembalikan mandatnya. Akibatnya tidak pernah ada kestabilan pemerintahan.

Muangthai dalam pemilihan umumnya tanggal 26 Januari 1975 melaksanakan sistem pemilihan mekanis dengan cara sistem perwakilan distrik/*single member constituencies*.

V. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 26 JANUARI 1975

Hari Minggu tanggal 26 Januari 1975 Muangthai melangsungkan pemungutan suara untuk memilih pemerintah yang untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia ke-II dipilih langsung oleh rakyat dan didominasi oleh tokoh sipil.

Dalam pemilihan umum ini, ikut serta 2191 calon, yang berarti lebih dari delapan calon untuk setiap kursi dari 269 kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang baru ini. Diantaranya terdapat sejumlah guru besar, kepala kampung, seorang aktris layar putih, seorang supir taksi dan sejumlah besar pengusaha. Lebih dari separuh dari calon ini merupakan orang baru di bidang politik. Untuk keperluan pemungutan suara ini, telah dipersiapkan sekitar 20 ribu kotak suara di pelbagai pelosok negeri ini.

Pemilihan umum ini, yang pertama dalam enam tahun, merupakan puncak dari suatu kampanye bebas yang mengotori hampir setiap jengkal permukaan vertikal di kota-kota dengan plakat-plakat, dan yang lebih banyak menonjolkan personalia daripada partai atau program partai.

Pemilihan umum ini juga mengakhiri suatu pemerintah yang tidak keras, yang umumnya terdiri dari tokoh non politik, yang ditunjuk oleh tahta kerajaan Muangthai setelah rejim Thanom Kittikachorn digulingkan oleh pergolakan. Pemerintah di bawah pimpinan Sanya Thammasak setelah revolusi Oktober 1973 ini berusia lebih panjang dari semua pemerintah sipil Muangthai sebelumnya dan berhasil menelorkan suatu konstitusi baru serta merancang pemilihan umum yang paling bebas dan paling adil dalam sejarah Muangthai selama ini.

Hanya dua wakil menteri dari kabinet sementara Thammasak yang ikut dalam pertarungan politik ini. Lainnya, karena kecapaian akibat pemogokan, kerusuhan, protes dan krisis ekonomi yang tak berkesudahan, akan mengundurkan diri ke usaha masing-masing.

Menurut konstitusi baru itu, kabinet yang akan terbentuk harus dipilih dari sayap legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota angkatan bersenjata atau pegawai negeri yang mau ikut dalam pencalonan keanggotaan DPR harus lebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya.

Tindakan resmi PM Sanya Thammasak yang terakhir adalah penunjukan 100 Senator pada hari pemilihan umum, yang semuanya dipilihnya sendiri berdasarkan daftar yang

disodorkan oleh Raja Bhumibol Adulyadej. Senat itu nantinya tidak akan mempunyai banyak kekuasaan, kecuali memperlambat pengesahan undang-undang.

Dari 42 partai yang ikut bertarung dalam pemilihan umum ini, hanya enam atau delapan partai yang diperkirakan akan memenangkan sebagian terbesar dari kursi parlemen, tetapi tidak satu partai pun diharapkan dapat memegang mayoritas. Pemerintah yang sekarang ini tidak menginginkan dipilih kembali, dan karena pemerintah itu sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperkecil perpecahan politik, maka sebagai jauh sebelum ini. Yang lebih sulit lagi dramatis adalah bentuk pemerintah keadil yang mungkin akan keluar beberapa minggu setelah seluruh suara selesai dihitung. Seorang pengamat politik yang cukup ahli mengatakan: "Tidak ada satupun partai besar dalam pemilihan umum ini yang secara ideologi mungkin kawan dengan partai besar lain". Dengan mempertimbangkan semua faktor, menurut kebanyakan pengamat politik, kemungkinan yang terbesar adalah terbentuknya suatu pemerintah yang relatif konservatif, yang dengan hati-hati akan meneruskan pola pemerintahan Muangthai terakhir ini, yaitu reformasi dalam negeri dan pendekatan pada negara komunis. Hubungan Muangthai dengan Amerika Serikat, yang sedang beralih dari hubungan buruh-majikan ke hubungan antar kawan sejak sebelum Thanom Kittakachorn dinasir, akan meneruskan pola perubahan itu, hanya sedikit diperlambat atau dipercepat dari pemerintahan itu sendiri. Ada sejumlah warga Muangthai, yang belum lupa akan rekor kudeta, komplotan gelap dan dominasi militer di negaranya sejak monarki absolut dihapuskan pada tahun 1932, mengkhawatirkan terbentuknya nanti suatu pemerintah baru yang begitu terkotak-kotak dan tidak efektif, sehingga seperti di waktu lampau, pemerintah baru itu akan diberi waktu hanya beberapa bulan untuk menggantungkan dirinya, sebelum diangkat darat mengambil alih kekuasaan. Akan tetapi lebih banyak warga Muangthai yang menyatakan percaya akan janji tokoh militer sendiri untuk tidak mencampuri urusan politik. Mereka ini mengemukakan bahwa sejumlah tokoh militer yang berkedudukan pertama bertanggung jawabannya atas permasalahan ekonomi maupun sosial yang melanda negara ini, suatu negara yang boleh dikatakan paling beban dan termasuk paling miskin di kawasan ini. Terlebih lagi, tampaknya setelah 15 bulan mengenyam pemerintahan yang liberal dari Sanysa Thammajak, masyarakat Muangthai dan kelompok mahasiswa yang terorganisasi rapih di negara ini, tidak mungkin akan mentoleransi kembalinya pemerintahan tangan besi.

Partai-partai besar yang ikut dalam pemilihan umum ini pada tanggal 26 Januari 1975 adalah:

1. Partai Demokrat yang moderat liberal, di bawah pimpinan Seni Pramoj.
2. Partai Keadilan Sosial yang berhaluan kanan, di bawah pimpinan Dewitt Khamprathum.
3. Partai Aksi Sosial (SAP), di bawah pimpinan Kukrit Pramoj.
4. Partai Kekuatan Baru ("New Force" NF).

5. Partai Sosialis.
6. Partai Nasional Thai (CT), di bawah pimpinan Mayjen. (purn.) Pramarn Adireksarn.
7. Partai Agraria Sosial (SA), di bawah pimpinan Savet Plemphongsan.
8. Partai Nasionalis Sosial, di bawah pimpinan Prasit Kanchanawat.

VI. HASIL PEMILIHAN UMUM

Dari hasil pemilihan umum di Muangthai sampai hari Senin tanggal 27 Januari 1975, tidak ada satupun dari 42 partai peserta pemilihan umum yang menang mutlak. Dengan demikian maka pemerintahan akan merupakan koalisi, sedang parlemen akan terdiri dari sekitar 20 partai. Pemilihan umum yang diselenggarakan ini merupakan pemilihan umum yang paling demokratis selama lebih dari 40 tahun ini dan berlangsung dengan aman. Pemilihan pertama diselenggarakan pada tahun 1932, yang menghapuskan monarki mutlak dan diganti dengan monarki konstitusional serta tidak ada partai pemerintah yang ikut pemilihan. Hanya salah satu hal yang agak mengecewakan dalam pemilihan umum ini adalah bahwa dari 19 juta pemilih yang berhak suara, hanya 40% saja yang menggunakan haknya. Muangthai pada saat itu secara keseluruhan berpenduduk 40 juta orang.

Dari 42 partai yang bertarung dalam pemilihan umum ini untuk memilih 269 wakil rakyat dalam parlemen, hanya 22 partai yang berhasil mendapatkan kursi dalam parlemen, hasil pilihan kurang dari 40% warga yang memiliki hak suara. Dari 22 partai itu, hanya sembilan partai yang memiliki 10 kursi atau lebih. Tigabelas partai lainnya terpaksa berbagi 34 kursi sisa, diantaranya lima partai masing-masing hanya memiliki satu kursi.

Perincian pembagian kursi di parlemen, hasil pemilihan umum ini adalah sebagai berikut:

<i>No. Urut</i>	<i>Nama Partai</i>	<i>Jumlah kursi yang diperoleh</i>
1.	Partai Demokrat	72
2.	Partai Keadilan Sosial	45
3.	Partai Nasional Thai	28
4.	Partai Agraria Sosial	19
5.	Partai Aksi Sosial	18
6.	Partai Nasionalis Sosial	16
7.	Partai Sosialis	15
8.	Partai Kekuatan Baru	12
9.	Partai Uni Sosialis	10
<u>10-22</u>	13 Partai Lainnya	<u>34</u>
22 Partai		269 kursi

Untuk dapat memenangkan mayoritas mutlak dalam parlemen sekurang-kurangnya harus diperoleh 135 kursi. Dari hasil pembagian kursi di atas dapat dikatakan tidak ada satu partaipun yang memperoleh mayoritas mutlak, sehingga untuk memperoleh mayoritas mutlak, partai yang mempunyai kursi terhanyak harus berkoalisi dengan partai lainnya yang lebih kurang sehaluan. Kemungkinan pertama adalah koalisi antara Partai Demokrat pimpinan Seni Pramoj (72 kursi) dengan Partai Kekuatan Baru (12 kursi), Partai Sosialis (15 kursi), Partai Uni Sosialis (10 kursi) dan Partai Aksi Sosial yang dipimpin oleh Kukrit Pramoj, adik dari Seni Pramoj (18 kursi); karena masing-masing partai tersebut dapat dikategorikan sebagai pembawa sikap liberal-demokrat.

Di pihak lain berdiri kelompok konservatif yang dipelopori oleh Partai Keadilan Sosial pimpinan Dewitt Klinprathum, salah seorang raja uang di Muangthai (45 kursi) yang akan memegang peranan dalam pembentukan koalisi oposisi bersama dengan tiga partai keturunan UTPP (Partai Persatuan Rakyat Thailand yang mendukung rejim militer di bawah PM Thanom Kittikachorn, yang kini telah dibubarkan), yaitu Partai Nasional Thai (28 kursi), Partai Agraria Sosial (19 kursi) dan Partai Nasionalis Sosial (16 kursi). Kenyataannya dalam pembentukan kabinet koalisi yang terjadi adalah koalisi antara Partai Demokrat (72 kursi) dengan Partai Nasional Thai (28 kursi), Partai Agraria Sosial (19 kursi), Partai Aksi Sosial (18 kursi) dan Partai Kekuatan Baru (12 kursi), tetapi ternyata koalisi ini tidak ada ketentuannya. Akhirnya pada waktu dilakukan pemungutan suara di parlemen untuk memilih perdana menteri yang baru pada tanggal 13 Februari 1975, tokoh Partai Demokrat Seni Pramoj berhasil terpilih sebagai perdana menteri dengan kelebihan 81 suara di atas saingannya terdekat yaitu Mayjen. Chatichai Choonhavan, sekjen Partai Nasional Thai, yang didukung oleh angkatan bersenjata. Dengan demikian berakhir suatu permainan politik yang hangat di negara ini sejak pemilihan umum tanggal 26 Januari 1975, tetapi Seni Pramoj masih harus menghadapi tugas berat, yaitu membentuk kabinet yang mau tidak mau harus berkoalisi, mungkin dengan beberapa partai kecil diantara 22 partai yang berhasil memperoleh kursi dalam parlemen tersebut. Dalam pemungutan suara anggota parlemen Muangthai tanggal 13 Februari 1975 itu, hanya 223 anggota parlemen dari 269 anggota parlemen yang hadir. Dari 46 anggota yang tidak hadir, kebanyakan terdiri dari anggota yang tadinya hadir tetapi meninggalkan sidang pada saat pemungutan suara diselenggarakan, sebagai protes terhadap keputusan ketua sidang parlemen Prasit Kanchanawat, yaitu pada waktu membuka acara pemungutan suara itu, Kanchanawat menetapkan keputusan yang melarang kehadiran non-anggota dalam pemungutan suara, dan larangan itu mencakup juga para wartawan. Kemudian, karena banyaknya protes anggota, Prasit Kanchanawat mencabut kembali status sidang tertutup, tetapi banyak anggota sudah terlanjur meninggalkan sidang. Mula-mula tiga anggota dicalonkan oleh sidang untuk memperebutkan kedudukan calon perdana menteri, yaitu Seni Pramoj, Chatichai Choonhavan dan Kukrit Pramoj, tetapi Kukrit Pramoj kemudian langsung menyebut namanya sendiri waktu pemungutan suara dimulai.

sehingga sisa pertarungan adalah satu lawan satu. Dengan 38 suara abstain, termasuk Seni Pramoj sendiri, pemimpin Partai Demokrat ini akhirnya merebut 133 suara, jauh meninggalkan Choonhavan yang hanya mendapat 52 suara. Mayoritas mutlak sebenarnya adalah 135 suara, tetapi di atas kertas mayoritas sudah ditangan Seni Pramoj, bila dihitung juga suara abstain Seni Pramoj sendiri ditambah satu suara anggota partainya yang tidak dapat hadir karena sakit. Seni Pramoj, seorang tokoh perjuangan Muangthai dalam Perang Dunia ke-II, sudah pernah menjabat kedudukan perdana menteri, meskipun hanya empat setengah bulan antara akhir tahun 1945 sampai awal tahun 1946. Sejak monarki absolut dihapuskan dari negara ini 42 tahun yang lalu, Muangthai sudah mengalami 33 kabinet yang kebanyakan tidak berusia panjang. Seni Pramoj membentuk Partai Demokrat setelah akhir Perang Dunia II menjadi partai oposisi menghadapi rejim-rejim militer sampai rejim Marsekal Thanom Kittikachorn bulan Oktober tahun 1973 yang lalu.

Kabinet koalisi di bawah pimpinan Perdana Menteri Seni Pramoj, setelah disumpah resmi oleh Raja Bhumibol Adulyadej hanya berusia 8 hari saja. Kabinet tersebut pada hari Kamis malam tanggal 6 Maret 1975 telah jatuh akibat mosi-tidak-percaya parlemen negara itu. Sehari kemudian dua partai kedua terbesar di Muangthai setelah Partai Demokrat pimpinan Seni Pramoj, menyatakan akan memberikan dukungan kepada Kukrit Pramoj, adik Seni Pramoj, bila tokoh Partai Aksi Sosial itu mengajukan diri sebagai perdana menteri yang baru. Yang menjadi sebab jatuhnya koalisi minoritas Seni Pramoj adalah karena persoalan kehadiran militer Amerika Serikat di Muangthai dengan 25.000 tentara dan 300 pesawat terbang, yang merupakan bahan perdebatan utama dalam konfrontasi pertama Seni Pramoj dengan parlemen hari Kamis tanggal 6 Maret 1975 selama 13 jam. Kabinet koalisi Seni Pramoj menghendaki penarikan tentara Amerika Serikat dari Muangthai dalam waktu 18 bulan. Sebagian menganggap jangka waktu itu terlalu singkat, mengingat perkembangan buruk di Kamboja, sebagian lagi menganggapnya terlalu lama. Hasil pemungutan suara adalah 152 tidak setuju dan 111 setuju dari 269 anggota parlemen Muangthai, sehingga menjatuhkan kabinet koalisi minoritas Seni Pramoj dan menceburkan negara ini ke dalam krisis pemerintahan baru.

Hari Jum'at tanggal 7 Maret 1975, partai Keadilan Sosial dan partai Nasional Thai, kedua-duanya mendapat dukungan dari kalangan militer, menyatakan akan mendukung Kukrit Pramoj. Partai Keadilan Sosial (45 kursi) dan Partai Nasional Thai (28 kursi) bersama-sama memiliki 73 suara dalam parlemen, jadi lebih besar dari partai Demokrat yang hanya mendapat 72 suara, sedangkan partai Aksi Sosial sendiri mempunyai 18 kursi dalam parlemen, yang berarti merupakan partai kelima terbesar, dan sebelumnya Kukrit Pramoj sudah menyatakan akan mencari dan mendapatkan dukungan dari 18 partai kecil yang mempunyai kursi dalam parlemen tersebut. Keyakinan ini diperkuat lagi oleh pernyataan dukungan dari dua partai besar itu. Hasilnya Kukrit Pramoj menjadi Perdana Menteri berikutnya menggantikan abangnya Seni Pramoj.

Perkembangan yang paling mutakhir pada saat itu adalah berhasilnya pasukan Khmer Merah menguasai dan merebut ibukota Kamboja yaitu Phnom Penh, dan juga dikuasanya pemerintah boneka Vietnam Selatan serta direbutnya ibukotanya Saigon (kini bernama Ho Chi Minh City setelah Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu dengan ibukota Hanoi) melalui penyerahan tanpa syarat pada tanggal 30 April 1975 oleh Pasukan Pemerintah Revolusioner Sementara Vietnam Selatan (PRSVS), sehingga timbul masalah baru bagi Muangthai yang menempatkan dirinya dalam kancah politik luar negeri yang terjepit, yaitu:

1. Masalah pengungsi Kamboja dan Vietnam Selatan yang terdiri dari orang asing dan warganegara Kamboja dan Vietnam Selatan yang tidak mau mengakui pemerintah baru yang revolusioner dari kedua negara itu, di mana secara geografis Muangthai merupakan perbatasan yang terdekat dari kedua negara tersebut.
2. Masalah kapal-kapal terbang yang dilarikan ke Muangthai oleh pasukan pemerintah lama Vietnam Selatan.
3. Masalah direbutnya kembali kapal peti-kemas Amerika Serikat yang bernama Mayaguez dari pasukan Khmer Merah yang sebelumnya telah merebut kapal tersebut, yang dilakukan oleh pasukan militer Amerika Serikat yang berpangkalan di Muangthai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Harmaily, *Pemilihan Umum di Indonesia 1955, 1971 dan 1977*, Jakarta: Alhidayah, 1974.
- "Koalisi Muangthai Masih Teka-teki," *Kompas*, 29 Januari 1975.
- "Krisis Pemerintahan di Muangthai: Seni Pramoj Turun, Kukrit Pramoj Naik," *Kompas*, 8 Maret 1975.
- "Masih Macet Usaha Bentuk Kabinet Koalisi," *Kompas*, 3 Februari 1975.
- Myrdal, Gunnar. "An Inquiry into the Poverty of Nations," *Asian Drama*, Volume III, New York: Pantheon, 1967.
- "Pemilu Muangthai Hari Minggu," *Kompas*, 25 Januari 1975.
- "Pemilu Muangthai: Tidak Ada yang Menang Mutlak," *Kompas*, 28 Januari 1975.
- "Seni Pramoj Perdana Menteri Baru Thailand," *Kompas*, 14 Februari 1975.
- Suny, Ismail, "Hubungan-Hubungan Sipil-Militer dengan Muangthai Sebagai Suatu Kasus," *Makalah*, tanpa tahun.
- _____, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Calindra, 1965.